



Perencanaan Sebagai Bagian Dari Manajemen Pendidikan Dalam Maritime Training Untuk Pelaut

Achsin Syifaul Milah¹, Suklani²

^{1,2}IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Received: 12 Juli 2024
Revised: 24 Juli 2024
Accepted: 30 Juli 2024

Abstract

Nusantara, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia, memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan maritim. Berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% di antaranya melewati perairan Indonesia. Indonesia juga merupakan negara terbesar ketiga sebagai pemasok tenaga pelaut niaga di dunia. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi lembaga pendidikan, sekolah – sekolah pelayaran, dan maritime training center untuk menjaga kualitas SDM Pelaut Indonesia agar dapat bersaing secara global. Perencanaan diklat pelaut adalah proses penentuan tujuan diklat kepelautan dan penentuan strategi, kebijakan, prosedur, metode, system, serta anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mengelola perencanaan diklat kepelautan harus mampu melaksanakan empat komponen yang sangat mendasar yaitu ;Hal apa saja yang harus dilatih (*what to train*), Bagaimana cara melatihnya (*how to train*), Pelaksanaan latihan (*training*), dan Pemeriksa latihan (*check training*). Pada akhirnya perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis formal serta legal mengikuti aturan baik nasional dan internasional bukan hanya pada intuisi dan firasat (*dugaan*).

Keywords: perencanaan, manajemen, pendidikan, maritime, training, pelaut

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Milah, A., & Suklani, S. (2024). Perencanaan Sebagai Bagian Dari Manajemen Pendidikan Dalam Maritime Training Untuk Pelaut. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 40-45. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13848334>

PENDAHULUAN

Poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri dan kuat. Indonesia berwujud negara kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% di antaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti, posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia.

Indonesia juga merupakan negara terbesar ketiga sebagai pemasok tenaga pelaut niaga di dunia. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk menjaga kualitas SDM Pelaut Indonesia agar dapat bersaing secara global. Pendidikan, dan pelatihan pelaut memerlukan strategi yang baik untuk menghadapi dan memenangkan persaingan global. Tuntutan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional dan internasional menjadi wajib adanya.

Ada 3 pilar utama di dunia kemaritiman yang sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran, perlindungan laut dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bahari yakni : *Safety of Life at Sea (SOLAS)*, *Prevention of Pollution from Ship (MARPOL)*, dan *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW)*. Indonesia sebagai negara anggota Dewan Internasional

Maritime Organization (IMO) wajib tatat dan patuh terhadap *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* (STCW). Konvensi tersebut menjadi acuan pendidikan dan pelatihan pada perguruan tinggi, sekolah-sekolah kejuruan pelayaran dan maritime training center yang ada di Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan untuk menciptakan pelaut yang unggul secara efektif dan efisien itulah, manajemen harus difungsikan sepenuhnya dalam organisasi pendidikan. Menurut Terry fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengaturan (*controlling*).

Setiap kegiatan yang mempunyai arah dan tujuan, memerlukan suatu perencanaan. Tanpa perencanaan yang tepat, tujuan tidak akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menjamin agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.

METHODS

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)” Penelitian kepastakaan merupakan proses penyelidikan yang di dasarkan pada literatur yang sudah ada dengan memanfaatkan basis data perpustakaan, mesin pencari akademik, indeks jurnal, Seleksi sumber, evaluasi sumber, mensintesis informasi, dan penyusunan laporan. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi, menemukan informasi yang relevan, menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan serta mengekspresikannya menjadi temuan baru yang berkaitan dengan manajemen perencanaan maritime training.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antar manusia, iklim organisasi (konteks organisasi), dan sistem. Ketiga interaksi tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saling berinteraksi pula dengan lingkungan eksternalnya.

H.A.R. Tilaar, berpendapat bahwa manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Djarm’an Satori memberikan pengertian manajemen pendidikan sebagai keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Menurut Sulistyorini, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien.

Dilihat dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan diatas, maka kita dapat mendefinisikan Manajemen Pendidikan sebagai suatu Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa man, money, materials, method, machines, market,

minute dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan.

Perencanaan Dalam Manajemen Pendidikan

Definisi Perencanaan menurut Bintoro Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan menurut Prajudi Atmosudirdjo ialah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukannya, bilamana, dimana, dan bagaimana cara melakukannya.

Perencanaan menurut Siagian ialah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Yusuf Enoch mendefinisikan Perencanaan Pendidikan, merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternative keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya serta menyeluruh suatu Negara.

Y. Dror Perencanaan Pendidikan merupakan suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara-cara optimal untuk pembangunan ekonomi dan social secara menyeluruh dari suatu Negara.

Dengan demikian definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut adalah suatu proses perumusan kebijakan dan instrument sekaligus teknik penentuan prioritas, juga merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu negara serta penghubung antara harapan orang tua, masyarakat, peserta didik dan negara dalam upaya mencapai tujuan maupun fungsi pendidikan

Menurut Roesmingsih , perencanaan pelatihan meliputi:

- 1) Menetapkan tujuan pelatihan
- 2) Menyusun strategi pelatihan
- 3) Menentukan metode pelatihan
- 4) Membuat silabus
- 5) Menentukan materi pelatihan
- 6) Membuat session plan,

Sedangkan dalam Asnawir menyatakan bahwa langkah-langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan
- 3) Masalah-masalah atau informasi-informasi yang diperlukan
- 4) Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan
- 5) Merumuskan bagaimana masalah-masalah tersebut akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan pekerjaan itu harus diselesaikan
- 6) Menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut
- 7) Menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana.

Maritime Training

Proses penyiapan sumber daya manusia maritime untuk mengisi kebutuhan pelaut sesuai dengan kebutuhan pasar kerja industri pelayaran internasional dan nasional harus memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan *International Maritime Organization* (IMO) melalui STCW 1978 beserta amandemennya. Salah satu persyaratannya sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000 pada Bab I ketentuan umum pasal (3), Pelaut adalah seseorang wajib memiliki kualifikasi keahlian/*Certificate of Competency* (CoC) dan kualifikasi keterampilan/*Certification of Proficiency* (CoP) sebagai awak kapal. Kedua sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) sebagai perwakilan administrasi IMO di Indonesia. Khusus untuk mendapatkan CoC seorang taruna harus mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Kepelautan (Pertikepel) dan untuk mendapatkan sertifikat (CoP) dapat di peroleh melalui diklat lembaga maritem traning center yang di kelola oleh masyarakat dan atau milik pemerintah.

Program Diklat Keterampilan Pelaut merupakan program diklat untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan melakukan tugas dan atau fungsi tertentu di kapal. Adapun materi yang disampaikan kepada peserta Diklat tergantung jenis Diklat yang diikuti, misal untuk Diklat BST diberikan materi pengetahuan dasar mengenai cara menghadapi kebakaran dan jenis alat-alat yang harus digunakan dalam memadamkan api, program pengenalan dan pelatihan dasar keselamatan serta teknik survival baik secara individu maupun secara berkelompok.

Bila kita berbicara mengenai standarisasi dalam pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi awak kapal, tentu kita tidak dapat lepas dari konvensi STCW 1978/95 (Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Menurut STCW Convention dan STCW Code, STCW 1978/95 adalah suatu konvensi internasional yang dikeluarkan IMO (Interntional Maritime Organization) yang didalamnya terdapat standar minimum pelatihan dan sertifikasi untuk awak kapal. Konvensi ini di adopsi dari International Conference On Training and Certification of Seafarers yang dilaksanakan pada 7 Juli 1978. Hingga saat ini Konvensi STCW 1978/95 sudah mengalami beberapa kali amandemen dan yang terakhir dilaksanakan di Manila pada tanggal 21-25 Juni 2010 atau dikela SCTW 2010. Peraturan tersebut berlaku bagi seluruh awak kapal yang akan berlayar dilaut yang bendera kapalnya terdaftar di Negara yang sesuai bendera kapal, kecuali kapal perang, kapal ikan, kapal konvensional dan perahu yang tidak dalam kepentingan perdagangan. Standar Diklat Kepelautan yang disyaratkan STCW meliputi: (1) Eksistensi institusi, (2) Standar Peralatan, (3) Standar kurikulum, (4) Standar jadwal, alokasi waktu, (5) Standar instruktur, dan (6) Standar pelatihan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut. Peraturan ini dengan sangat jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan diklat kepelautan baik diklat keahlian maupun keterampilan, harus memenuhi Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Konvensi Internasional STCW 1978 beserta amandemennya.

Untuk di Indonesia ada paling tidak 3 kurikulum pendidikan pelaut

- 1) System pendidikan pelaut kurikulum departemen pendidikan di bawah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Contohnya Akademi Pelayar dan Sekolah Tinggi Pelayaran.

- 2) Kurikulum SCTW, *system training* ini dikelola di bawah kementerian perhubungan. Contohnya *maritime training center* baik di kelola masyarakat dan atau pemerintah Kurikulum non SC.
- 3) TW biasanya di kelola LPK, dan perusahaan pelayaran

Pelaut

Pelaut adalah Seorang yang bekerja diatas kapal, termasuk merawat dan mengemudikan Kapal dan pengoperasian peralatan yang ada di kapal. Bisa juga Pelaut diartikan sebagai orang yang pekerjaannya berlayar di laut. Hal tersebut diatas sudah mencakup orang yang bekerja diatas kapal atau biasa di sebut dengan ABK, Anak Buah Kapal atau Crew Kapal.

Pelaut itu sendiri dikenal dalam Pasal 1 angka 40 UU Pelayaran sebagai awak kapal, yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.

Selain UU Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (“PP Kepelautan”) juga menegaskan beberapa ketentuan ketenagakerjaan untuk pelaut. Merujuk pada Pasal 17 PP Kelautan, untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan salah satunya adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;

Menurut Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 sebagai berikut : Ayat 40: “*Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil*”. Cukup jelas bahwa semua posisi dikapal dari Kapten sampai Messboy adalah awak kapal.

pelaut adalah merupakan produk dari Diklat Kepelautan Dan pendidikan nyang bersifat teknis. Area kerja pelaut pada dasarnya tidak bisa dibatasi oleh batas geografis negara, artinya pelaut bisa berlayar ke laut manapun sesuai kualifikasi ijasah pelaut dan tonase kapal. Oleh karenanya logis jika pelaut diautur dengan peraturan internasional, yaitu *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* disingkat STCW 1978. Regulasi yang dinaungi oleh *International Maritime Organization* (IMO).

KESIMPULAN

Perencanaan dalam manajemen pendidikan maritime training adalah suatu proses perumusan kebijakan dan instrument sekaligus tehnik penentuan prioritas, Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, manajemen pendidikan maritime training hendaknya memperhatikan perencanaan, karena perencanaan merupakan awal dari segala aspek yang akan dilakukan dalam proses pendidikan dan pelatihan. Selain langkah awal, perencanaan merupakan aktifitas untuk memilih berbagai alternative tindakan yang kesemua itu bermuara kepada suatu target yang diharapkan demi kemajuan pendidikan.

Perencanaan diklat adalah proses penentuan tujuan diklat kepelautan dan penentuan strategi, kebijakan, prosedur, metode, system, anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mengelola diklat harus mampu melaksanakan empat

komponen yang sangat mendasar yaitu ;Hal apa saja yang harus dilatih (what to train) Bagaimana cara melatihnya (how to train) Pelaksanaan latihan (training);Pemeriksa latihan (check training).

Pada akhirnya perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional, sistematis, legal dan formal mengikuti aturan yang berlaku baik nasional dan internasional bukan hanya pada intuisi dan firasat (dugaan).

DAFTAR PUSTAKA

- Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2010)
- Made Pidarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Usman Husaini, *Manajemen – Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Ed. 3 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)
- Afiful Ikhwan, *Perencanaan Pendidikan dalam Manajemen*
<http://afifulikhwan.blogspot.com>
- Endang Sunarya, *Teori Perencanaan Pendidikan : Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000),
- Roesminingsih, Erny. 2009. *Pedoman Model dan Paket Pelatihan Peningkatan Mutu Guru dalam Prespektif ManajemenStrategik*.
- Asnawir, *Manajemen Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2006)
- Salinan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2000
- Salinan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008
- Salinan Menti Perhubungan RI PM 70 Tahun 2013
- IMO , STCW 1978 and its amendments.